



KATALOG BPS: 3303002.11

# STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI ACEH

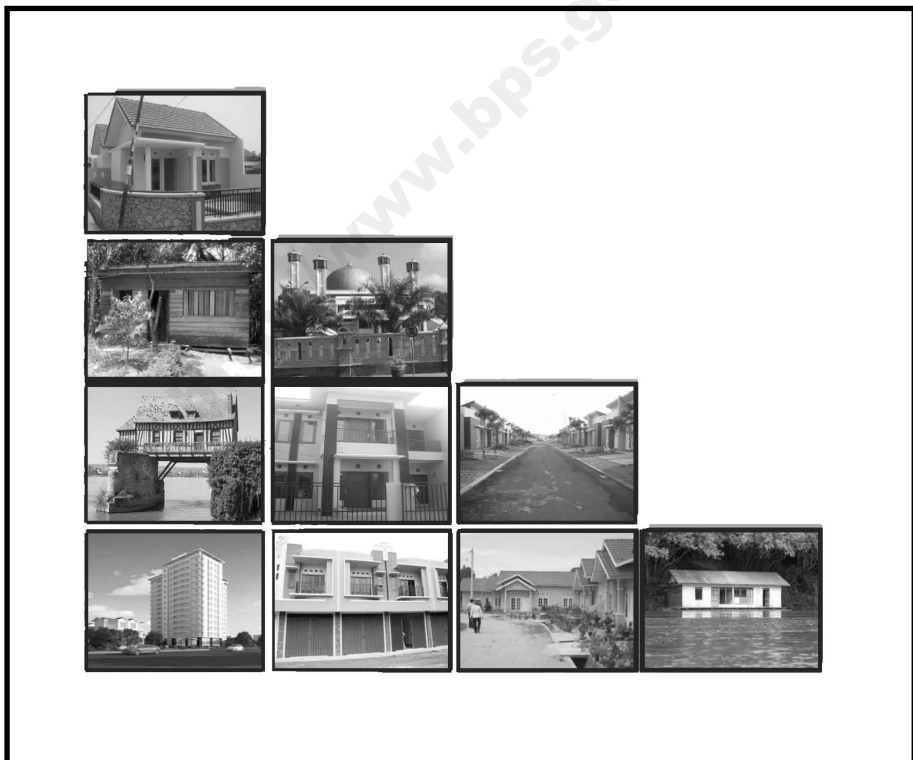
*(Hasil Sensus Penduduk 2010)*



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA

# STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI ACEH

(HASIL SENSUS PENDUDUK 2010)



# **Statistik Perumahan Provinsi Aceh**

(Hasil Sensus Penduduk 2010)

ISBN: 978-979-064-419-9

Nomor Publikasi: 042300.1103

Katalog BPS: 3303002.11

Ukuran Buku: JIS B5 (7,17 inch x 10,12 inch)

Jumlah Halaman: 38 Halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Gambar kulit:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh:

CV. Dharmaputra

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

## KATA PENGANTAR

Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) disamping mengumpulkan keterangan demografi juga mengumpulkan data perumahan. Publikasi ini merupakan publikasi dari hasil pengumpulan data Perumahan SP 2010 yang diterbitkan dalam bentuk buku untuk setiap provinsi dan buku dengan data agregat Indonesia.

Buku Statistik Perumahan ini menyajikan gambaran analisis diskriptif situasi dan perkembangan perumahan. Data yang disajikan meliputi data tentang status kepemilikan bangunan, jenis dan luas lantai, sumber penerangan utama, sumber air minum, sanitasi, bahan bakar untuk memasak, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan penentuan kebijakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta pengguna data lain dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi program pembangunan perumahan.

Kepada tim penulis yang membuat publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan publikasi ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2011

Deputi Bidang Statistik Sosial



**Drs. Wynandin Imawan, M.Sc**

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	2
<b>BAB II    KARAKTERISTIK PERUMAHAN.....</b>	9
2.1 Kepemilikan/Penguasaan Bangunan.....	10
2.1.1. Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal ...	10
2.1.2. Bukti Kepemilikan.....	13
2.2 Jenis dan Luas Lantai.....	16
2.2.1. Jenis Lantai Terluas.....	16
2.2.2. Luas Lantai.....	17
2.3 Sumber Penerangan Utama.....	19
2.4 Sumber air Minum.....	20
2.5 Sanitasi.....	22
2.5.1. Fasilitas Tempat Buang Air Besar.....	22
2.5.2. Tempat Pembuangan Akhir Tinja.....	22
2.6 Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari.....	24
2.7 Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal.....	26
2.8 Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	27
<b>BAB III    PENUTUP .....</b>	29

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dokumen, 2010.....	10
Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010.....	11
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	11
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	14
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal adalah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal menurut Bukti Kepemilikan Tanah, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	15
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2010.....	16
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Rumah Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	18
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah, 2010.....	19
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Tipe Daerah, 2010.....	21
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah, 2010.....	22
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2010.....	23
Tabel 12. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak dan Tipe daerah, 2010.....	25
Tabel 13. Persentase Rumah Tangga menurut Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	26
Tabel 14. Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Telepon dan Tipe Daerah, 2010.....	27
Tabel 15. Persentase Rumah Tangga menurut Akses Internet selama Tiga Bulan Terakhir dan Tipe Daerah, 2010.....	28

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Yang menempati Rumah Milik Sendiri menurut Kabupaten/kota, 2010.....	12
Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010.....	13
Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Bukti menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010.....	14
Gambar 4. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita dan Tipe Daerah, 2010.....	17
Gambar 5. Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik menurut Kabupaten/kota, 2010.....	20
Gambar 6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik menurut Kabupaten/Kota, 2010.....	24



<http://www.bps.go.id>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan utama disamping pangan dan sandang bagi setiap penduduk. Selain sebagai kebutuhan pokok, rumah juga mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja seseorang. Dengan demikian secara menyeluruh keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi. Tetapi, di lain pihak kemampuan untuk mengusahakan adanya perumahan yang layak tergantung pada adanya perkembangan dan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah.

Keadaan perumahan di Provinsi Aceh masih jauh daripada mencukupi, baik dilihat dari jumlah maupun kualitas/kondisi perumahannya yang sebagian besar belum memenuhi persyaratan-persyaratan perumahan yang layak. Masalah perumahan biasanya terdapat di daerah perkotaan yang ditandai dengan sangat kurangnya jumlah rumah yang ada dibandingkan dengan banyaknya penduduk, serta banyaknya rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan kehidupan dan pembangunan yang layak, seperti perkampungan-perkampungan dipinggir kota dan gubuk-gubuk liar didalam kota. Demikian pula terdapat kesulitan-kesulitan mengenai tanah, fasilitas air minum, keadaan penerangan, kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Pembangunan perumahan sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan agar permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dapat teratasi. Agar pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan optimal dan lebih terarah, maka diperlukan data yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan.

Data yang disajikan dalam publikasi ini, seluruhnya memanfaatkan data perumahan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) Provinsi Aceh. Data perumahan yang disajikan meliputi status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah tempat tinggal, jenis lantai, luas lantai, sumber penerangan, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, bahan bakar untuk memasak sehari-hari, penguasaan telepon, dan akses internet selama 3 bulan terakhir. Untuk memudahkan pembaca, publikasi ini juga dilengkapi dengan definisi operasional yang digunakan dalam pengumpulan data.

Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik disertai ulasan atau analisis deskriptif pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibedakan menurut daerah tempat tinggalnya (perkotaan/perdesaan). Diharapkan melalui penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik, pengguna data akan lebih mudah untuk memahami dan lebih tertarik untuk membacanya.

## **1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup**

Tujuan penulisan Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Aceh Hasil SP2010 adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna data di bidang perumahan yang bersumber dari data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Data perumahan yang digunakan menerangkan karakteristik bangunan yang ditempati oleh rumah tangga, karena SP2010 adalah sensus yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga.

SP2010 mencakup seluruh penduduk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). Anggota korps diplomatik negara lain beserta anggota rumahtangganya, meskipun menetap di wilayah teritorial Indonesia, tidak dicakup dalam pencacahan SP2010. Sedangkan anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumahtangganya yang berada di luar negeri akan dicakup dalam SP2010.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Penyajian pada penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Bab Pertama, yaitu Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, sistematika penulisan, serta konsep dan definisi. Bab Kedua adalah karakteristik mengenai perumahan di Provinsi Aceh hasil SP2010 serta Bab Ketiga Penutup.

## **1.4. Konsep dan Definisi**

**Bangunan fisik** adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 meter persegi dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

**Contoh Bangunan Fisik:** rumah, hotel, toko, pabrik, sekolah, masjid, kuil, gereja, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya.

**Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

**Rumah tangga** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

**Milik sendiri** adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap milik sendiri.

**Kontrak** adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus dimuka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

**Sewa** adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seseorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

**Status kepemilikan tempat tinggal lainnya** adalah jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori diatas misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat, rumah dinas, termasuk didalamnya rumah bebas sewa.

**Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART** adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART.

**Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART** adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk ART.

**Sertipikat lain** adalah Tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. Sertipikat ini bisa berupa:

- SHGB (sertipikat hak guna bangunan)
- SHP (sertipikat hak pakai)
- SHM-SRS (sertipikat hak milik atas satuan rumah susun)

Lainnya adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) seperti girik, akte jual beli

**Girik** adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah, baik yang sudah dipecah maupun induknya.

**Akte Jual Beli** adalah Akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Termasuk di Lainnya adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU).

**Lantai** adalah alas/dasar suatu bangunan tempat tinggal responden. Jenis lantai terdiri dari keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu, tanah. dan lainnya. Lantai ubin yang dilapisi karpet atau vinil tetap dikategorikan ubin. Jika lantai bangunan tempat tinggal lebih dari satu jenis, pilih yang terluas.

**Luas Lantai** adalah keseluruhan luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus.

Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah keseluruhan luas dari semua tingkat yang ditempati.

Catatan:

1. Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah tangga, maka luas lantai ruangan yang dipakai bersama, luas lantainya dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakannya.

2. Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah tangga dan masih dalam satu blok sensus, maka luas lantainya dihitung seluruhnya.
3. Taman yang di dalam rumah, atau yang di samping rumah namun masih di bawah atap, semuanya ditambahkan sebagai luas lantai.

**Listrik non PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh PLN).

**Listrik PLN meteran** adalah sumber penerangan yang diproduksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran secara bersama-sama. Dalam SP2010, rumah tangga yang tinggal di apartemen dianggap memiliki sumber penerangan listrik PLN meteran.

**Listrik PLN tanpa meteran** adalah sumber penerangan yang diproduksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal.

**Bukan listrik** adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji (LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah (petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan kemiri).

**Air kemasan** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 600 ml, 1,5 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas, seperti antara lain air kemasan merk Aqua, VIT, Aïress, Moya, 2 Tang, MQ, dan termasuk air minum isi ulang.

**Ledeng sampai rumah** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh Perusahaan Air Minum (PAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), atau Badan Pengelola Air Minum (BPAM), baik dikelola pemerintah maupun swasta. Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini. Ledeng eceran adalah rumah tangga

yang minum dari air ledeng yang diperoleh dari pedagang air keliling dianggap mempunyai sumber air minum ledeng eceran.

**Pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

**Sumur** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu air sumur terlindung dan tidak terlindung.

**Sumur terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut tetap dikategorikan sumur terlindung.

**Sumur tak terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

**Mata air** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air kemudian dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa ledeng tanpa proses penjernihan maka sumber air minumannya tetap mata air.

**Mata air terlindung** adalah bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Mata air tak terlindung** adalah bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Air sungai** adalah air yang bersumber dari sungai.

**Air hujan** adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.

**Sumber air lainnya** adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam.

**Fasilitas tempat buang air besar/jamban sendiri** adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

**Fasilitas buang air besar/jamban bersama** adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu.

**Fasilitas tempat buang air besar/jamban umum** adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.

**Tidak ada fasilitas tempat buang air besar/jamban** adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

**Tangki septik** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, yang terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik mempunyai bak resapan maupun tidak.

**Tempat pembuangan tanpa tangki septik** adalah tempat pembuangan tanpa tangki septik seperti cubluk, cemplung.

**Tidak punya tempat pembuangan** adalah tempat pembuangan akhir seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun.

**Penguasaan Telepon** adalah penguasaan rumah tangga atas telepon kabel (*Public Switched Telephone Network*, flexi home). Tanpa kabel (telepon seluler /*Handphone/Mobile Phone*)

**Internet (*Interconnected Network*)** adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet mencakup komputer yang ada di dalam rumah (yang dikuasai oleh rumah tangga) dan di luar rumah (warnet, kantor, sekolah, rumah saudara, rumah teman, dan lain-lain).

**Akses Internet** adalah mengoperasikan media internet secara aktif, termasuk yang mengakses internet dengan menggunakan HP.

**Bahan bakar** adalah jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak seperti listrik, gas, minyak tanah, arang, kayu, lainnya



<http://www.bps.go.id>

## **BAB II. KARAKTERISTIK PERUMAHAN**

Sesuai dengan cakupan SP2010 yang meliputi seluruh penduduk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak tetap maka bersamaan pelaksanaan SP2010 dicacah pula seluruh bangunan dan rumah tangga. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap antara lain tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, suku terasing, dan penghuni perahu/rumah apung. Anggota korps diplomatik negara lain beserta anggota rumah tangganya, meskipun menetap di wilayah teritorial Indonesia tidak dicakup dalam SP2010. Sebaliknya anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumahtangganya yang berada di luar negeri akan dicakup dalam SP2010.

Bervariasinya tempat tinggal penduduk tersebut tentunya membuat mekanisme pendataan tidak bisa disamaratakan untuk semua rumah tangga. Untuk mengakomodasi hal tersebut maka pendataan SP2010 di Provinsi Aceh menggunakan kuesioner/dokumen yang berbeda untuk tiap-tiap kondisi, yaitu:

1. Kuesioner SP2010-C1 (selanjutnya disebut C1), digunakan untuk pencacahan lengkap rumah tangga umum.
2. Kuesioner SP2010-C2 (selanjutnya disebut C2), digunakan untuk pencacahan rumah tangga yang tinggal di lokasi khusus atau "tidak terpetakan", masyarakat terpencil, penghuni perahu, dan untuk anggota Korps Diplomatik RI beserta ART-nya di luar negeri.
3. Kuesioner SP2010-L2 (selanjutnya di sebut L2), digunakan untuk mencacah penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap seperti tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, pengungsi dan suku terasing.

Sebanyak 1.066.321 (99,98 persen) rumah tangga berhasil didata dengan dokumen C1 sedangkan sisanya dengan dokumen C2 umum (0,002 persen) dan L2 (0,02 persen). Jumlah rumah tangga menurut jenis kuesioner/dokumen dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dokumen, 2010**

Jenis Dokumen	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
C1	1.066.321	99,98
C2 Umum	25	0,002
L2	176	0,02
<b>Jumlah</b>	<b>1.066.522</b>	<b>100,00</b>

Sumber: SP2010

Dengan kuesioner C1 maka informasi perumahan pada setiap rumah tangga akan didapatkan secara lengkap, sementara dengan dokumen lainnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak ditanyakan.

Idealnya satu bangunan tempat tinggal dihuni satu rumah tangga. Dalam kenyataannya, tidak sedikit suatu bangunan tempat tinggal yang dihuni dua atau lebih rumah tangga. Sementara itu, pencacahan SP2010 menggunakan pendekatan rumah tangga. Akibatnya bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh dua atau lebih rumah tangga akan dicacah berkali-kali sesuai dengan banyaknya rumah tangga yang ada. **Karena itu, perlu dipahami bahwa hasil SP2010 tidak menggambarkan banyaknya bangunan tempat tinggal (rumah) di Provinsi Aceh, melainkan memperlihatkan gambaran tentang banyaknya rumah tangga di Provinsi Aceh yang menghuni bangunan tempat tinggal menurut karakteristiknya.**

## **2.1 Kepemilikan/Penguasaan Bangunan**

### **2.1.1 Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal**

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah dibanding dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah.

**Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010**

Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	62,74	81,91	76,58
Kontrak	17,34	3,82	7,58
Sewa	5,70	0,86	2,20
Lainnya	14,22	13,41	13,64
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

Menurut hasil SP2010, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Provinsi Aceh sebesar 76,58 persen, sisanya 23,42 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 7,58 persen menempati rumah kontrak, sewa (2,20 persen), dan lainnya (13,64 persen). Persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di daerah perkotaan (37,26 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (18,09 persen).

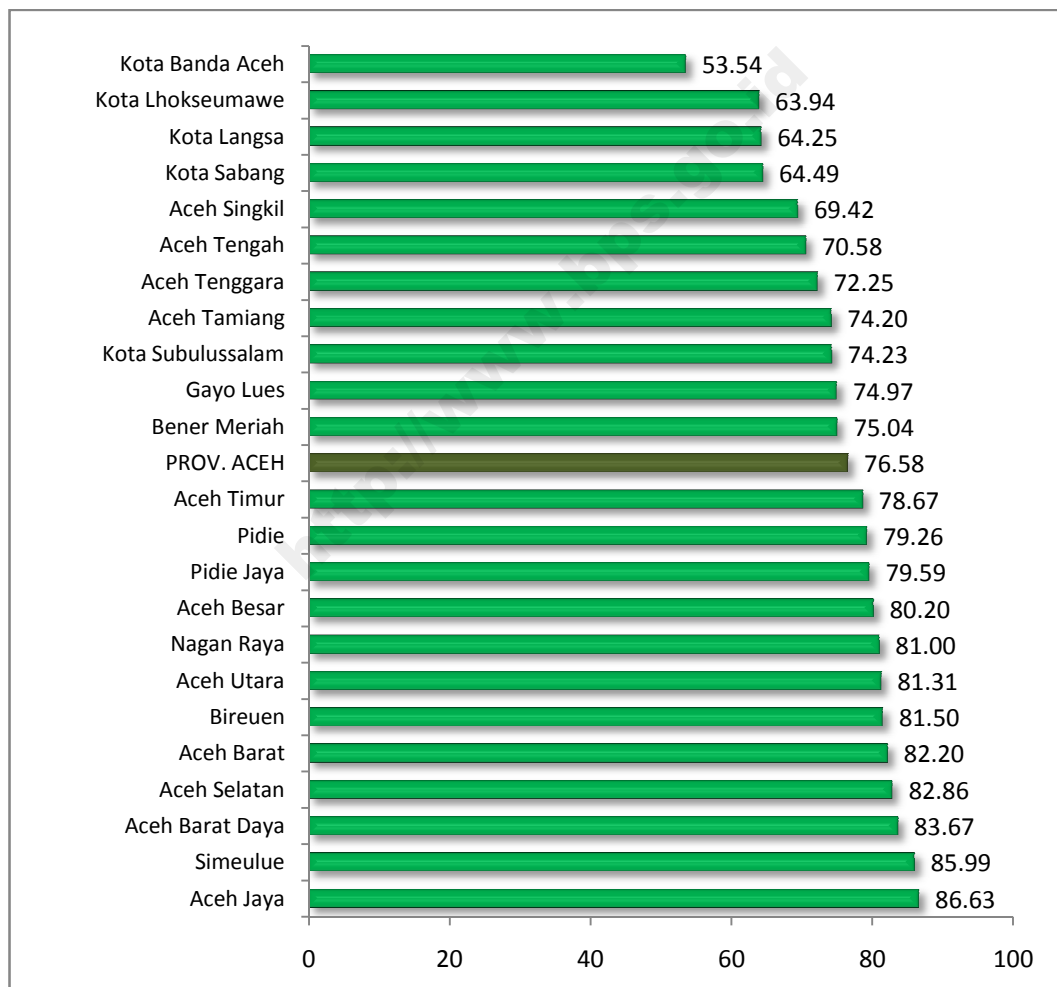
**Tabel 3. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Daerah , dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010**

Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik sendiri	61,41	69,33	80,32	88,31	74,92	83,65
Kontrak	17,62	15,92	4,31	1,82	8,11	5,28
Sewa	5,81	5,15	0,96	0,48	2,34	1,63
Lainnya	15,16	9,60	14,41	9,39	14,62	9,44
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari Dokumen C1,SP2010

Tabel 3 menunjukkan, persentase tertinggi status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal kepala rumah tangga dengan jenis kelamin laki-laki adalah milik sendiri yaitu 74,92 persen, nilai ini sedikit lebih rendah dibanding persentase tertinggi dengan status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal yang sama dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan yaitu 83,65 persen. Fenomena yang sama terjadi di perkotaan dan perdesaan dimana persentase status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih rendah dibanding persentase status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan.

**Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Kabupaten/Kota, 2010**



Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

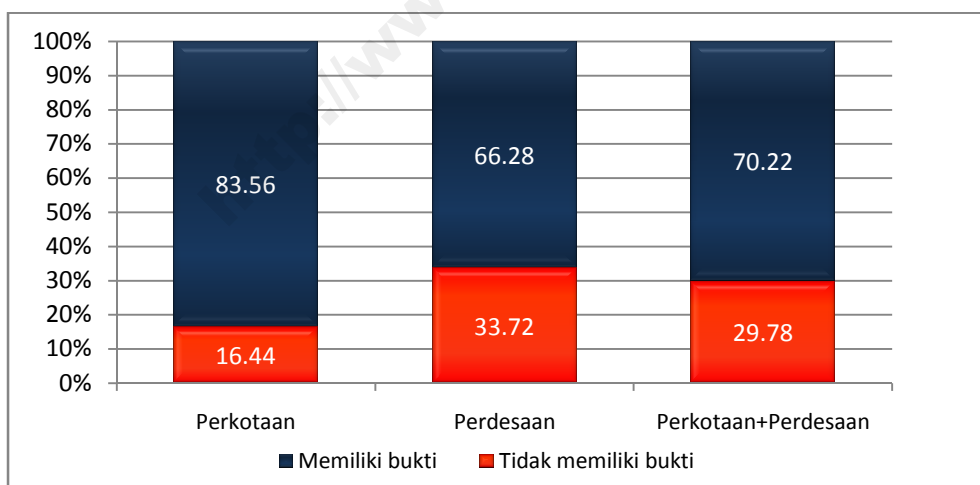
Gambar 1 menunjukkan, persentase terendah rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri terdapat di Kota Banda Aceh, yaitu sebesar 53,54 persen sedangkan persentase tertinggi terdapat di kab. Aceh Jaya, yaitu sebesar 86,63 persen.

### 2.1.2 Bukti Kepemilikan

Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah tempat tinggal maka setiap petak tanah seharusnya mempunyai bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Dengan adanya bukti kepemilikan atas suatu petak tanah, diharapkan dapat menjadi kekuatan hukum jika suatu saat terjadi sengketa atas tanah tersebut.

Informasi bukti kepemilikan tanah tempat tinggal yang dikumpulkan melalui Sensus Penduduk 2010 yaitu mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS), dan Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain). Pertanyaan mengenai bukti kepemilikan tempat tinggal ini hanya ditanyakan kepada rumah tangga yang status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggalnya adalah milik sendiri.

**Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2010**



Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

Gambar 2 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal adalah sebesar 70,22 persen, dengan komposisi di perkotaan sebesar 83,56 persen dan perdesaan sebesar 66,28 persen.

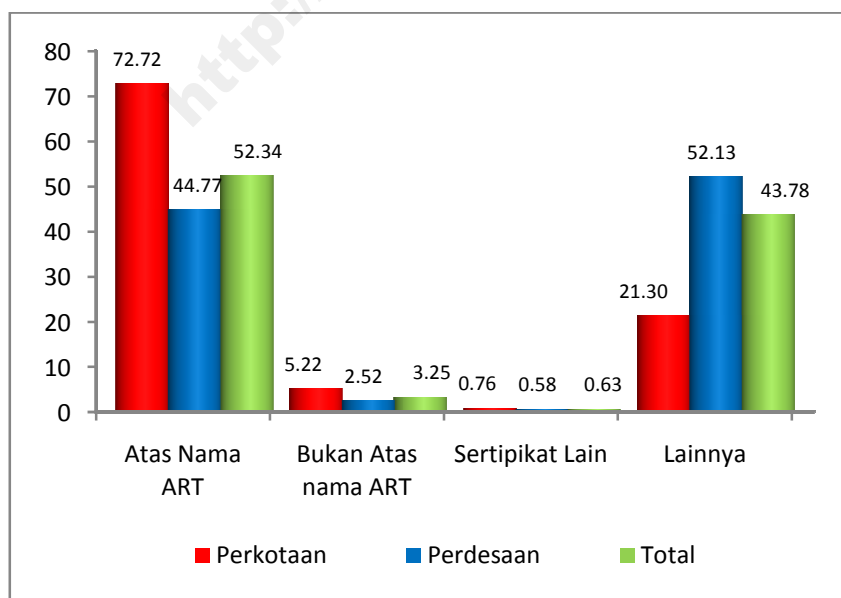
**Tabel 4. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010**

Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memiliki	83,71	82,90	66,53	65,36	70,55	68,93
Tidak Memiliki	16,29	17,10	33,47	34,64	29,45	31,07
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: : Diolah dari dokumen C1, SP2010

Bila rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di rinci lebih mendalam menurut bukti kepemilikan tanah tempat tinggal dan jenis kelamin kepala rumah tangga, persentase rumah tangga yang dikepalai laki-laki maupun perempuan sebagian besar memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal, yaitu masing-masing sebesar 70,55 persen dan 68,93 persen.

**Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Bukti menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal dan Daerah Tempat Tinggal, 2010**



Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

Berdasarkan Gambar 3, Jenis bukti kepemilikan tanah yang dimiliki rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebagian besar sudah hak milik atas nama ART, yaitu sebesar 52,34 persen. Namun, persentase rumah tangga yang jenis bukti kepemilikannya masuk kategori Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain) masih cukup besar, yaitu 43,78 persen dengan komposisi di perdesaan (52,13 persen) lebih banyak dibanding di perkotaan (21,30 persen). Karena itu, keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam meningkatkan status kepemilikan tanah dari Girik, Akte Jual Beli, dan sejenisnya menjadi SHM perlu ditingkatkan, terutama di daerah perdesaan.

**Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Status kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal adalah Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010**

<b>Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal</b>	<b>Perkotaan</b>		<b>Perdesaan</b>		<b>Perkotaan+ Perdesaan</b>	
	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART	73,19	70,62	45,28	42,83	53,03	49,64
Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART	5,17	5,47	2,62	2,17	3,32	2,98
Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS)	0,79	0,66	0,61	0,46	0,66	0,51
Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/ PPAT, dll)	20,86	23,25	51,49	54,53	42,99	46,87
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

Menurut Tabel 5, persentase tertinggi rumah tangga yang dikepalai laki-laki dengan status kepemilikan/penguasaan bangunan adalah milik sendiri dan memiliki bukti kepemilikan tanah menurut jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal adalah SHM atas nama art sebesar 53,03 persen. Hal yang sama terjadi pada rumah tangga yang dikepalai perempuan yaitu 49,64 persen.



## 2.2 Jenis dan Luas Lantai

### 2.2.1 Jenis Lantai Terluas

Dilihat dari segi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan dengan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori dari rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegél/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Aceh memiliki jenis lantai terluas adalah semen atau bata merah yaitu sebanyak 58,03 persen. Jenis ini adalah jenis lantai yang dianggap cukup baik dibandingkan kayu, bambu, tanah dan lainnya. Untuk Jenis lantai keramik/marmer/granit di Provinsi Aceh hanya sebesar 15,03 persen.

Menurut tipe daerah, fenomena di atas juga terjadi di perkotaan dan perdesaan dimana sebagian besar jenis lantai terluas adalah semen/bata merah yaitu masing-masing 56,31 persen dan 58,69 persen.

Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal yang berlantai tanah masih diatas 5 persen yaitu 7,43 persen. Mayoritas rumah berlantai tanah berada di daerah perdesaan yakni sebesar 9,52 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 2,00 persen.

**Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Daerah, 2010**

Jenis Lantai Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Keramik/marmer/granit	29,57	9,43	15,03
Ubin/tegél/teraso	3,80	0,90	1,70
Semen/bata merah	56,31	58,69	58,03
Kayu/papan	8,18	20,29	16,92
Bambu	0,11	1,13	0,85
Tanah	2,00	9,52	7,43
Lainnya	0,03	0,05	0,04
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

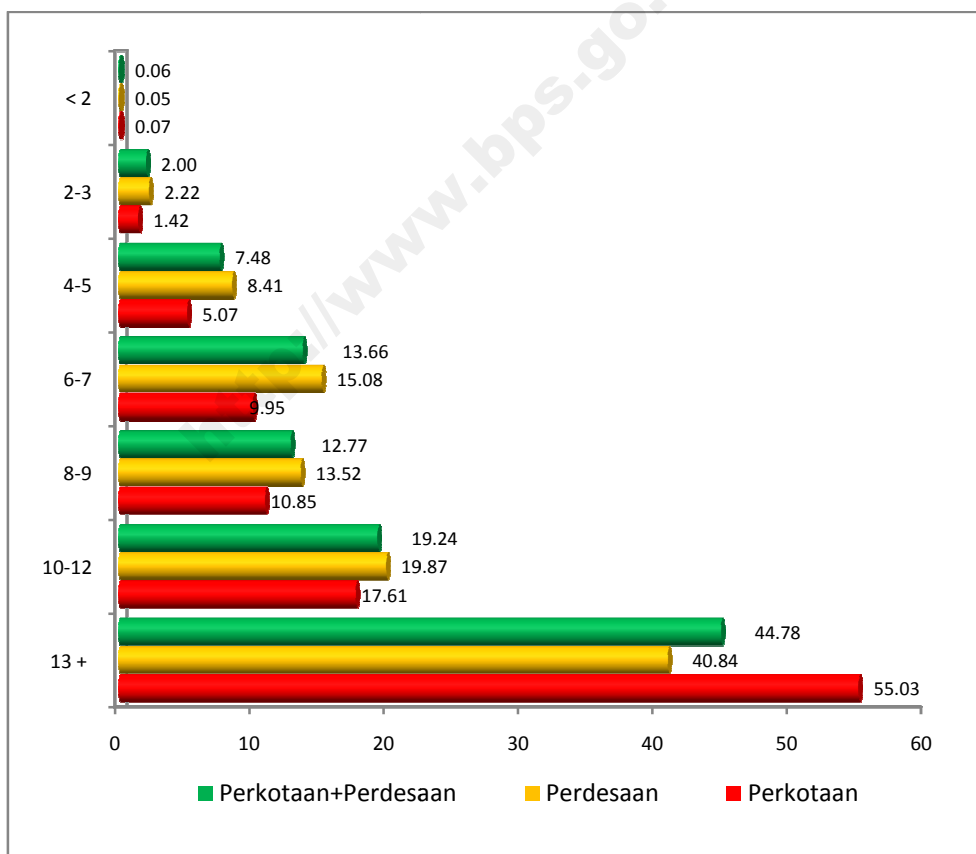
Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

### 2.2.2 Luas Lantai

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah total luas lantai dibagi total penduduk.

Pada Gambar 4. disajikan data luas lantai perkapita. Sebagian besar rumah tangga di Indonesia mempunyai luas lantai perkapita sebesar 13 m<sup>2</sup> atau lebih (56,98 persen). Pada gambar tersebut terlihat adanya suatu pola, yaitu semakin besar ukuran per kapitanya semakin besar persentasenya.

**Gambar 4. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita dan Tipe Daerah, 2010**



Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Jika diklasifikasikan menurut Kementerian Kesehatan maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita ideal (minimal 8 meter persegi) sebesar 76,80 persen. Sementara itu, menurut klasifikasi WHO dan APHA maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita ideal (minimal 10 meter persegi) sebesar 64,03 persen.

**Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Rumah Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010**

Kualitas Rumah Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas lantai perkapita < 9m <sup>2</sup>	22,46	16,04	36,75	18,62	32,67	17,99
lantai tanah	1,88	2,59	9,17	10,90	7,09	8,86

Sumber: SP2010

Menurut UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, rumah tunggal harus memiliki luas lantai minimal 36 meter persegi. Bila rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak maka harus memiliki luas perkapita minimal 9 meter persegi. Berdasarkan tabel 6 terlihat persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita < 9 meter persegi dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki (32,67 persen) cenderung lebih tinggi dibanding rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan (17,99 persen). Sedangkan bila menurut lantai tanah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

### 2.3 Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan di rumah tangga juga aspek perumahan yang perlu diperhatikan. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktifitas. Dari berbagai jenis sumber penerangan, penerangan yang dianggap paling baik adalah listrik.

**Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah, 2010**

<b>Sumber Penerangan Utama</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Listrik</b>	<b>98,85</b>	<b>90,71</b>	<b>92,97</b>
- PLN dengan meteran	95,49	83,80	87,05
- PLN tanpa meteran	2,53	4,56	4,00
- Bukan PLN	0,82	2,35	1,92
<b>2. Bukan Listrik</b>	<b>1,15</b>	<b>9,29</b>	<b>7,03</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari dokumen C1 dan C2, SP2010

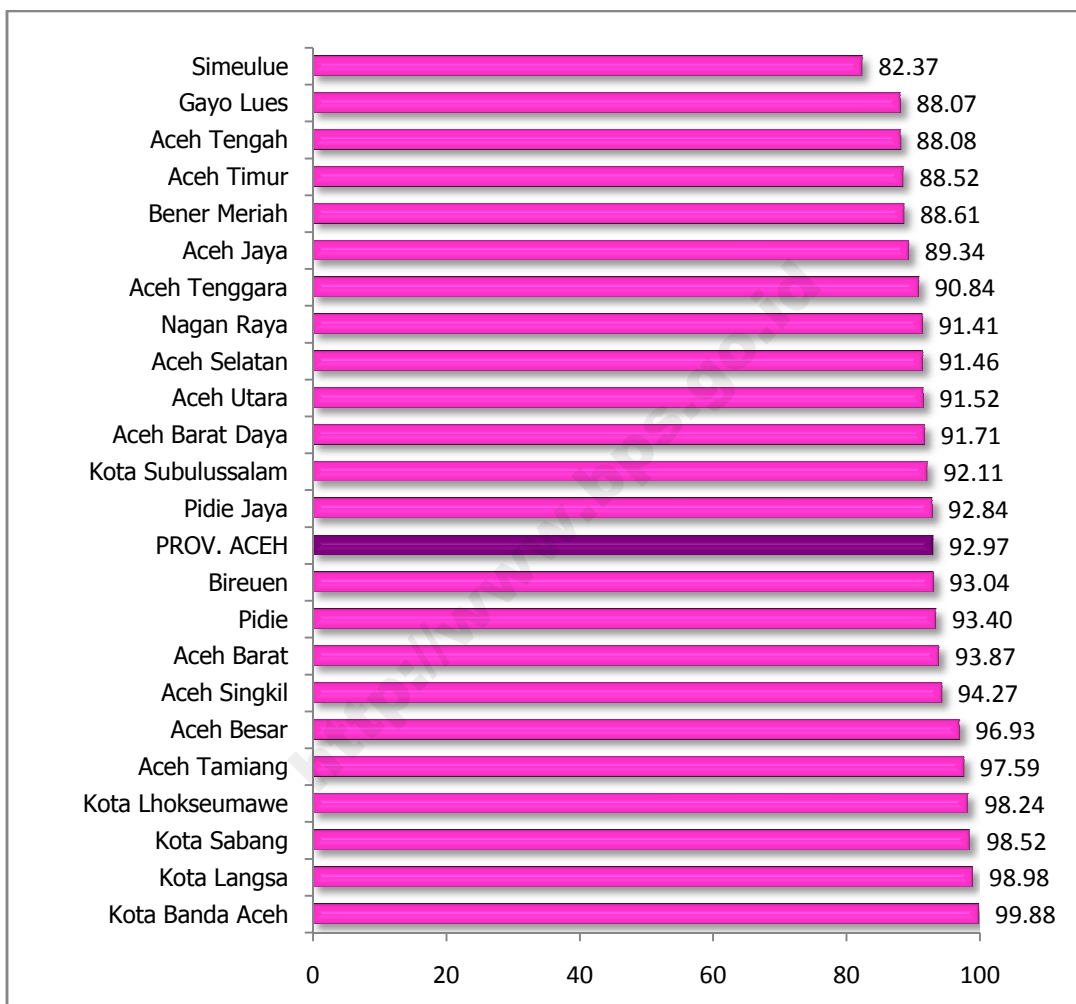
Secara umum rumah tangga di Provinsi Aceh sudah menikmati pembangunan infrastruktur listrik karena sebanyak 92,97 persen rumah tangga sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah tangganya, dan hanya 7,03 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Rumah tangga yang sudah menggunakan penerangan listrik lebih banyak di perkotaan (98,85 persen) dibanding di perdesaan (90,71 persen).

Sumber penerangan listrik bila di lihat menurut perusahaan listrik, di Aceh terdapat rumah tangga dengan sumber penerangan listriknya bukan dari PLN (1,92 persen). Sedangkan rumah tangga yang sumber penerangannya dari PLN tapi tanpa meteran sebesar 4 persen, dengan komposisi diperdesaan sebesar 4,56 persen dan perkotaan yaitu 2,53 persen.

Gambar 5 memperlihatkan, persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya listrik di seluruh kabupaten di Provinsi Aceh sudah cukup baik, ditandai dengan persentase terendah sebesar 82.37 persen pada Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Gayo

Lues (88,07 persen). Sementara itu, Kota Subulussalam (92,11 persen) merupakan kota yang paling rendah persentasenya diantara kota di Provinsi Aceh. Berturut-turut kota dengan persentasenya tertinggi hingga terendah adalah Kota Banda Aceh (99,88 persen), Kota Langsa (98,98 persen), Kota Sabang (98,52 persen), Kota Lhokseumawe (98,24 persen).

**Gambar 5. Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik menurut Kabupaten/kota, 2010**



Sumber: SP2010

## 2.4 Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-

rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas), artinya apabila satu rumah tangga ada lima orang anggota rumah tangga maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan minimal 7,5 liter air (40 gelas) untuk keperluan minum. Oleh karena itu, perlu pengadaan air minum yang cukup untuk setiap rumah tangga.

**Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Tipe Daerah, 2010**

<b>Sumber Air Minum</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan	48,49	9,52	20,35
Ledeng sampai rumah	12,75	5,66	7,63
Ledeng eceran	3,13	1,99	2,31
Pompa	3,30	2,46	2,69
Sumur terlindung	23,89	44,65	38,88
Sumur tidak terlindung	3,71	19,37	15,02
Mata air terlindung	2,06	5,86	4,80
Mata air tidak terlindung	0,98	3,31	2,66
Air sungai	0,70	5,18	3,94
Air hujan	0,76	1,42	1,24
Lainnya	0,22	0,59	0,49
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

Air yang berasal dari dalam tanah mempunyai hubungan dengan kelestarian lingkungan. Karena itu, penggunaan air minum yang berasal dari dalam tanah perlu dikurangi agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Berdasarkan hasil SP2010, kebutuhan air minum yang berasal dari dalam tanah (pompa, sumur terlindung, dan sumur tidak terlindung) masih diminati penduduk. Lebih dari setengah rumah tangga di Aceh (56,59 persen) menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.

Air kemasan, ledeng, dan pompa lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perkotaan. Sedangkan sumur, mata air, air sungai, dan air hujan lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perdesaan.

## 2.5 Sanitasi

### 2.5.1 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu kebutuhan penting dalam rumah tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa lebih terjaga kebersihannya. Berdasarkan hasil SP 2010, persentase rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar mencapai 27,53 persen. Sebagian besar rumah tangga tersebut berada di daerah perdesaan, yaitu sebesar 35,50 persen, sementara di perkotaan hanya sebesar 6,83 persen.

**Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah, 2010**

<b>Fasilitas Tempat Buang Air Besar</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamban Sendiri	83,42	49,95	59,25
Jamban Bersama	7,09	6,39	6,58
Jamban Umum	2,66	8,16	6,63
Tidak ada	6,83	35,50	27,53
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari dokumen C1, SP2010

### 2.5.2 Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tempat penampungan kotoran/tinja sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar seperti mempengaruhi kualitas air tanah dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Hampir 75 persen rumah tangga di Aceh telah menggunakan

tangki septik/SPAL, dengan penyebarannya lebih banyak di perkotaan (90,55 persen) dibanding di perdesaan (64,56 persen).

Bila diperhatikan rumah tangga di Aceh yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar (9,48 persen) menunjukkan meskipun persentasenya lebih kecil dibanding rumah tangga yang mempunyai fasilitas tepat buang air besar (90,52 persen), namun penyebaran di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan yaitu 13,11 persen berbanding 2,94 persen.

**Tabel 11. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2010**

<b>Tempat Pembuangan Akhir Tinja</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki septik	90,55	64,56	73,84
Tanpa tangki septik	6,51	22,33	16,68
Tidak punya	2,94	13,11	9,48
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

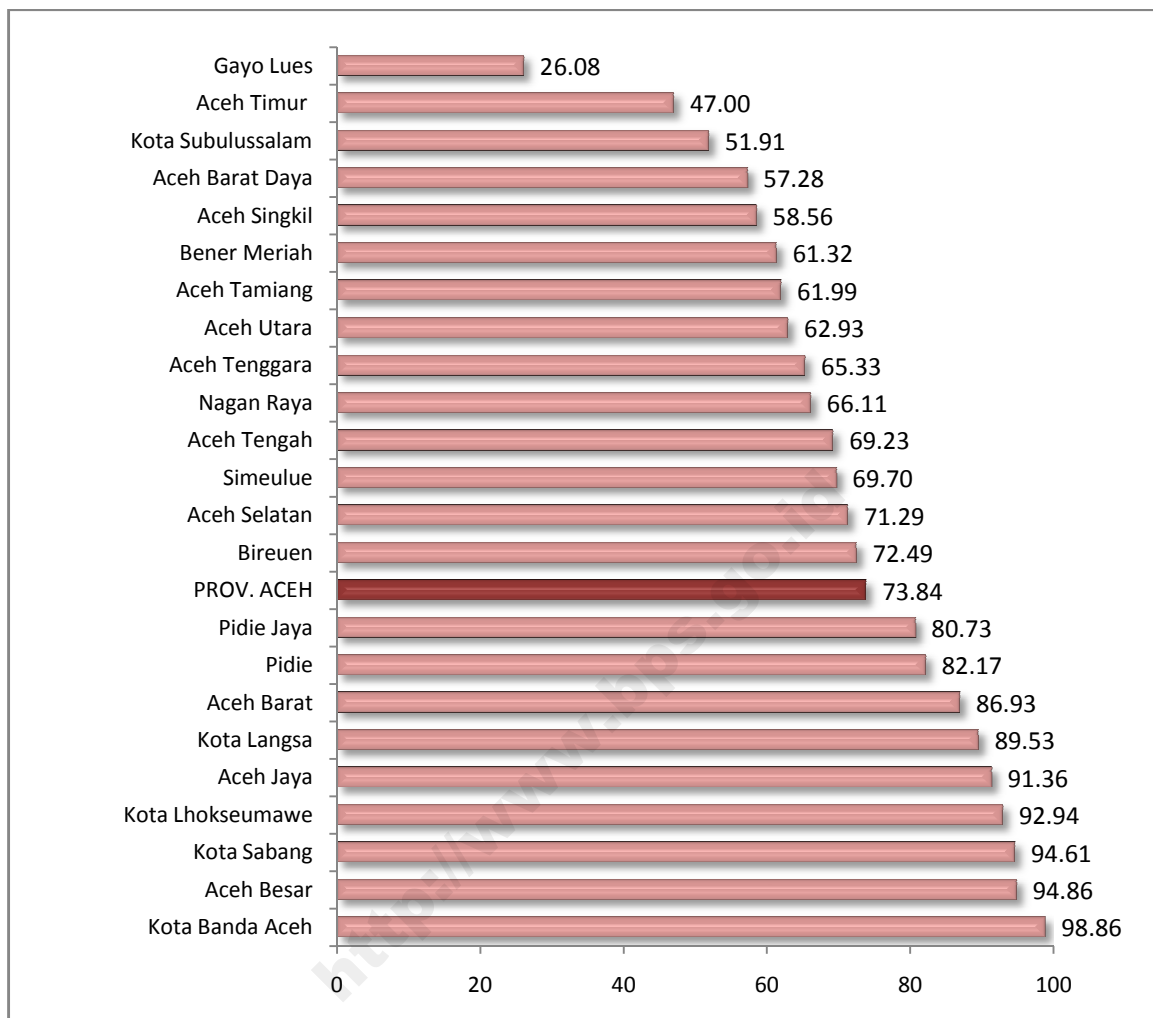
Sumber: Diolah dari Dokumen C1, SP2010

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota (Gambar 6), di Aceh terdapat lima kabupaten/kota dengan persentase Rumah tangga yang menggunakan tangki septik lebih dari 90 persen yaitu Kabupaten Aceh Jaya (91,36 persen), Kota Lhokseumawe (92,94 persen), Kota Sabang (94,61 persen), Kabupaten Aceh besar (94,86) dan Kota Banda Aceh (98,86 persen).

Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki persentase dibawah 60 persen dari tinggi ke rendah adalah Kabupaten Aceh Singkil (58,56 persen), Kabupaten Aceh Barat Daya (57,28), Kota Subulussalam (51,91 persen), Kabupaten Aceh Timur (47 persen) dan Kabupaten Gayo Luwes (26,08 persen).



**Gambar 6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik menurut Kabupaten/Kota, 2010**



Sumber: SP2010

## 2.6 Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari

Secara umum bahan bakar untuk memasak dikelompokkan menjadi bahan bakar padat (kayu bakar, arang, dan lainnya) dan bahan bakar tidak padat (listrik, gas, dan minyak tanah). Isu penggunaan bahan bakar padat untuk memasak sedang hangat dibicarakan saat ini karena jenis bahan bakar ini dapat menyebabkan polusi udara serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya sumber daya hutan.

**Tabel 12. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak, dan Tipe daerah , 2010**

<b>Jenis Bahan Bakar untuk Memasak</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Bahan Bakar Tidak Padat</b>	<b>88,93</b>	<b>43,39</b>	<b>56,04</b>
- Listrik	1,22	1,41	1,36
- Gas	35,56	8,80	16,23
- Minyak Tanah	52,15	33,18	38,45
<b>2. Bahan Bakar Padat</b>	<b>8,70</b>	<b>56,39</b>	<b>43,14</b>
- Arang	0,03	0,04	0,04
- Kayu Bakar	8,53	56,29	43,02
- Lainnya	0,14	0,06	0,08
<b>3. Tidak pakai/ tidak memasak</b>	<b>2,37</b>	<b>0,22</b>	<b>0,82</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: SP2010

Dari Tabel 12 terlihat bahwa penggunaan bahan bakar padat untuk keperluan memasak masih tinggi, yaitu sebesar 43,14 persen dengan distribusi lebih banyak di perdesaan (56,39 persen) dibanding di perkotaan (8,70 persen). Bila dilihat dari jenisnya, ada tiga jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan rumah tangga, yaitu kayu bakar (43,02 persen), minyak tanah (38,45 persen), dan gas (16,23 persen).

Ada ketimpangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal penggunaan bahan bakar gas dan kayu bakar. Bahan bakar gas lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perkotaan (35,56 persen) dibanding perdesaan (8,80 persen). Sementara itu, kayu bakar lebih banyak digunakan oleh rumah tangga di perdesaan (56,29 persen) dibanding di perkotaan (8,53 persen). Umumnya, penggunaan bahan bakar untuk memasak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat dan ketersediaan bahan bakar tersebut.

## 2.7 Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal

Kondisi ideal sebuah rumah tinggal umumnya dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas pokok yang biasa digunakan. Fasilitas pokok tersebut antara lain: berlantai bukan tanah, menggunakan sumber penerangan listrik, bahan bakar memasak listrik/gas dan mempunyai jamban sendiri dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik.

**Tabel 13. Persentase Rumah Tangga menurut Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010**

Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerangan Listrik	99,03	97,94	91,57	87,22	93,70	89,86
Memasak pakai Gas	37,79	24,50	9,75	4,94	17,75	9,74
Jamban sendiri dengan Tangki Septik	93,10	92,11	70,35	68,34	79,37	77,01

Sumber: : Diolah dari dokumen C1, SP2010

Tabel 13 menunjukkan, persentase menurut jenis kelamin kepala rumah tangga dan fasilitas pokok rumah tinggal terutama pada penerangan listrik dan tangki septik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada bahan bakar memasak dengan gas, terlihat cukup perbedaan antara kepala rumah tangga laki-laki dengan perempuan, yaitu kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dari pada kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan (17,75 persen dan 9,74 persen). Perbedaan ini akan lebih terlihat bila menurut daerah tempat tinggal, terutama di perkotaan dimana persentase kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki yang memakai gas untuk memasak lebih tinggi dari kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan (37,79 persen dan 24,50 persen).

## 2.8 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Wikipedia Berbahasa Indonesia, **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, TIK (bahasa Inggris: *Information and Communication Technologies*, ICT) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Contoh dari teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya telepon seluler).

**Tabel 14. Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Telepon dan Tipe Daerah, 2010**

<b>Penguasaan Telepon</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Kabel	0,80	0,25	0,40
Telepon Seluler	79,98	61,32	66,50
Telepon Kabel dan Seluler	6,86	0,69	2,40
Tidak Punya	12,35	37,75	30,69
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : SP2010

Secara umum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh rumah tangga di Provinsi Aceh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 14 dan 15 dimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya telepon kabel, telepon seluler, dan akses internet cukup bervariasi. Penggunaan telepon seluler paling diminati, yaitu sebanyak 66,50 persen rumah tangga di Provinsi Aceh menguasai telepon seluler sedangkan penduduk yang menguasai telepon kabel hanya sebesar 0,40 persen. Ada pun rumah tangga yang menguasai telepon kabel dan seluler sekaligus sebesar 2,40 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang melakukan akses internet dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebesar 10,86 persen. Angka ini masih tergolong rendah sehingga perlu usaha yang gigih agar pemanfaatan internet semakin populer di masyarakat. Karena internet adalah salah satu sumber informasi yang multi bidang dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa saja yang baru terjadi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat.

**Tabel 15. Persentase Rumah Tangga menurut Akses Internet selama 3 Bulan Terakhir dan Tipe Daerah, 2010**

<b>Akses Internet</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	21,89	6,61	10,86
Tidak	78,11	93,39	89,14
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Diolah dari dokumen C1, SP2010

### **BAB III. PENUTUP**

Permasalahan perumahan dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Jumlah penduduk yang besar serta keterbatasan lahan yang tersedia dapat mendorong tingginya permintaan terhadap kebutuhan perumahan. Tingginya permintaan tersebut harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia (sisi penawaran). Penting bagi pemerintah untuk mengusahakan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran, karena bila terjadi ketidakseimbangan dapat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat.

Dengan diterbitkannya publikasi ringkas ini, kami berharap dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat di bidang perumahan dengan menyediakan data perumahan hasil SP2010 sehingga keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran kebutuhan perumahan dapat tercapai.

Tentu saja publikasi ini masih ada yang perlu diperbaiki agar menjadi sempurna. Kami akan menampung segala kritik dan saran dari pembaca, karena jiwa yang besar adalah jiwa yang mau menghargai pendapat orang lain. Semoga bermanfaat.

<http://www.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: +62 021 3841195, 3842508, 3810291, Fax.: +62 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)

ISBN. 978-979-064-419-9



9 789790 644199